

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang pelik di lingkungan masyarakat adalah sampah. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sampah timbul disebabkan karena adanya sisa barang atau produk yang digunakan atau sisa makanan yang dikonsumsi. Tingginya jumlah penduduk dengan berbagai aktivitasnya, dapat mengakibatkan volume sampah juga ikut naik. Dalam konteks ini, diperlukan peran masyarakat sebagai penghasil sampah, untuk ikut mengelolanya terutama saat sampah tersebut masih berada di tingkat rumah tangga. Selain itu, juga diperlukan sistem tata kelola yang baik oleh pemerintah. Pengelolaan sampah yang tidak baik, dapat berdampak buruk dan menyebabkan pencemaran lingkungan, juga mengganggu keestetikan atau keindahan di sebuah tempat.

Indonesia secara umum masih mengalami banyak hambatan dalam melaksanakan sistem penanganan sampah. Hal tersebut dapat dilihat dari masih kurangnya akses pelayanan sampah, masih kurangnya komitmen yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dan didukung oleh minimnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap budaya hidup bersih serta kemampuan sumber daya manusianya yang masih rendah dalam mengelola sampah. Selain itu, permasalahan yang dihadapi juga berkaitan dengan kurangnya peraturan hukum dan sanksi yang tegas, fasilitas

pembuangan sampah yang kurang layak, minimnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurang baiknya sistem pengelolaan sampah di beberapa TPA atau tempat pembuangan akhir (Chaerul, 2007:41-49).

Permasalahan yang ada tersebut juga diperparah dengan volume sampah yang terus meningkat setiap waktunya. Di kota besar jumlah sampah yang diproduksi rata-rata mencapai lebih dari 500 ton per hari, sedangkan di kota sedang dengan jumlah penduduk kurang dari 500 orang per hektar, jumlah sampah yang dihasilkan rata-rata sebanyak 100 sampai 300 ton per hari.¹ Kondisi sampah yang semakin parah ini tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas atau sarana untuk pengelolaan sampah dan cara untuk mengatasinya.

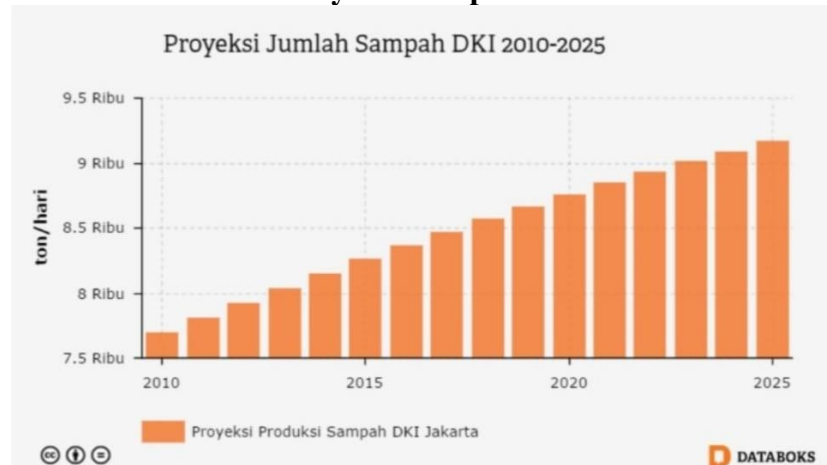
Permasalahan sampah yang runyam seperti itu, tentu lebih parah dialami oleh kota besar seperti Jakarta. Jakarta yang dinobatkan kota metropolitan dengan jumlah tingkat penduduk yang tinggi memiliki kompleksitas permasalahan sampah yang sangat rumit. Tingginya jumlah penduduk dan produksi sampahnya pada satu sisi, serta keterbatasan lahan dan fasilitas pada sisi lain, telah menyebabkan bertumpuknya persoalan sampah dalam kehidupan sehari-hari kota Jakarta. Walaupun statusnya sebagai ibukota negara yang menerapkan konsep *smartcity*, Jakarta belum bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang terjadi hingga saat ini. Tingginya volume sampah yang ada menimbulkan kesan kumuh dan kotor di beberapa bagian wilayah Jakarta tersebut, menunjukkan ketidaksiapan pemerintah daerah DKI Jakarta

¹ Direktorat Pengembangan PLP. 2016. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Kebijakan Nasional tentang Pengelolaan Sampah*

dalam mengantisipasi permasalahan sampah yang terus meningkat tiap tahunnya.

Volume sampah yang ada di wilayah Jakarta pada tiap tahunnya mengalami peningkatan. Terhitung volume sampah yang dikirim dari Jakarta ke TPST Bantar Gebang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 volume sampah yang dikirim sekitar 6.419 ton per hari. Kemudian meningkat menjadi 6.562 ton perhari pada 2016, meningkat lagi 6.875 ton per hari pada tahun 2017, kemudian 7.453 ton per hari pada tahun 2018, meningkat lagi sekitar 7.702 ton per hari pada 2019, dan data terakhir pada tahun 2020 sekitar 7.424 ton per hari dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.² Berikut grafik peningkatan jumlah volume sampah dari tahun ke tahun di DKI Jakarta.

Gambar 1.1 Jumlah Proyeksi Sampah DKI Jakarta 2010-2025



(Sumber: Databoks.katadata.co.id)

Bahkan jumlah sampah di DKI Jakarta juga diproyeksikan akan terus bertambah sampai 9.000 ton per hari pada tahun 2025. Jumlah penduduk yang

² Rosiana Haryanti. 2021. Sampah dari DKI yang Dikirim ke TPST Bantar Gebang Meningkat Tiap Tahun. Dikutip dari [Kompas.com](https://www.kompas.com) pada Agustus 2021

sangat besar menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya jumlah sampah yang ada di wilayah Jakarta. Tingginya jumlah penduduk dan juga pendapatan akan mempengaruhi dan membuat sifat hidup yang konsumtif, sehingga dapat berdampak pada meningkatnya sampah yang dihasilkan (Soemarwoto, 2001:55).

Penanganan sampah menjadi permasalahan yang penting bagi Pemprov DKI Jakarta. Akan tetapi, Pemprov DKI Jakarta belum serius untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebelumnya pada 2013, Ahok selaku Wakil Gubernur saat itu telah berencana untuk membuat empat tempat pengolahan sampah terpadu atau *Intermediate Treatment Facility* (ITF). Pembangunan ITF tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dikirim dan sampah yang dibuang di TPST Bantar Gebang. Akan tetapi, pada kenyataannya hingga Ahok menjabat menjadi Gubernur, pembangunan tersebut belum juga terealisasi. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab Pemprov DKI Jakarta masih mengandalkan TPST Bantar Gebang untuk menjadi tempat pembuangan sampahnya.

Apabila berpedoman pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yaitu yang berisi mengenai Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah DKI Nomor 3 Tahun 2013 yang bersisi mengenai Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa pemerintah setempat mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan upaya pengendalian sampah dengan menyiapkan ataupun mengembangkan sejumlah fasilitas dan sarana pengelolaan sampah yang ada. Akan tetapi, amanat tersebut belum

dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta.³ Oleh karena itu, belum ada fasilitas atau teknologi untuk mengelola sampah di Jakarta. Sehingga ketika ada sampah yang diproduksi di Jakarta, langsung dibawa ke TPST Bantar Gebang tanpa adanya proses pengelolaan di Jakarta. Hal tersebut yang membuat volume sampah di Jakarta yang masuk ke TPST Bantar Gebang terus meningkat setiap tahunnya.

TPST Bantar Gebang yang selama ini menjadi tempat semua sampah residu warga DKI Jakarta diperkirakan akan kelebihan kapasitas dan dapat berhenti beroperasi di tahun 2022. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 tentang KSD yaitu meliputi program SAMTAMA, pengoptimalisasian TPST Bantar Gebang dan pembangunan FPSA untuk mengatasi permasalahan sampah di Jakarta. FPSA sendiri adalah fasilitas pengolahan sampah yang berfungsi untuk mengurangi sampah dengan teknologi ramah lingkungan. Proyek pembangunan FPSA adalah bentuk upaya dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi penimbunan sampah di TPST Bantar Gebang Jawa Barat. Di dalam kebijakan tersebut berupaya mengatasi sampah dimulai dari sumbernya atau dari ruang lingkup masyarakatnya hingga ke penampungan sampah di TPST Bantar Gebang.

Jika dilihat dari permasalahan sampah yang terjadi di Jakarta tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa bagaimana implementasi kegiatan

³ [Arfianto Purbolaksono](#). 2015. Ahok dan Kegagalan Mengelola Sampah Jakarta. Dikutip dari Geotimes.id pada 7 Juli 2022

strategis daerah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut dalam mengelola sampah. Fasilitas pengelolaan sampah sudah seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam rencana kerjanya. Jika sampah terus menumpuk dan mengakibatkan pencemaran, maka otomatis aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari pun juga ikut terganggu. Permasalahan sampah ini merupakan salah satu masalah sulit yang harus diselesaikan secara bersama antara pemerintah setempat dengan masyarakatnya. Apabila permasalahan sampah ini masih terjadi tentu semua konsekuensi yang timbul akibat permasalahan ini akan dirasakan atau ditanggung oleh masyarakat itu sendiri. Begitupun sebaliknya, jika semua permasalahan sampah ini dapat diselesaikan secara bersama maka masyarakat itu sendiri yang akan merasakan manfaatnya.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam skripsi ini dibatasi hanya pada pengelolaan sampah oleh Pemprov DKI Jakarta yang ditugaskan kepada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada kurun waktu 2021-2022. Berdasarkan dari latar belakang dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta; yang terdapat dalam KSD Program SAMTAMA, Pembangunan FPSA dan Optimalisasi TPST Bantar Gebang?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola sampah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk dapat menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah daerah Pemprov DKI Jakarta.
2. Untuk dapat menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola sampah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah inovasi kebijakan atau solusi baru atas permasalahan sampah yang terjadi di Jakarta ini. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi baru bagi penelitian yang memiliki tema atau pembahasan yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan semua kebijakan dan solusi yang diberikan dapat diimplementasikan dengan baik oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan sampah yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Dengan begitu, dapat diterapkan langsung di lingkungan masyarakat untuk dapat mencoba mengelola sampah sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan sampah yang terjadi.

1.5 Penelitian Terdahulu

Jika dilihat berdasarkan pada penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, banyak juga penelitian yang mempunyai topik atau pembahasan yang sama mengenai permasalahan sampah yang terjadi di Jakarta seperti penelitian yang dibuat oleh Ervani *et al*, (2021). Di dalam penelitiannya yang berjudul “Perencanaan Teknis Operasional Pengelolaan Sampah di Permukiman Padat Penduduk (Kelurahan Kota Bambu Selatan)” membahas mengenai permasalahan dalam operasional pengelolaan sampah yang semakin meningkat disebabkan oleh tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Pengadaan lahan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah adalah permasalahan yang utamanya. Melalui konsep 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) di wilayah permukiman padat penduduk dengan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien adalah tujuan dari perencanaan ini. Selain itu, penelitian mengenai persampahan juga pernah dilakukan oleh Sukwika & Noviana (2020). Berdasarkan pada hasil penelitian dan hasil pengamatannya, membahas mengenai pengelolaan sampah dari Jakarta secara terpadu di TPST Bantar Gebang yang masih cukup terbatas dilihat dari status keberlanjutannya dan biasanya hanya membatasi pada ruang lingkup pencemaran, masalah sosial yang ditimbulkan, dan isu perluasan kawasan TPA.

Dari banyaknya penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, beberapa penelitian tersebut biasanya hanya membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sampah. Selain itu, beberapa penelitian tersebut kebanyakan membahas atau mengidentifikasi bagaimana cara TPS dalam

mengelola sampah yang ditampungnya saja. Faktor atau yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian yang dilakukan ini untuk melanjutkan atau mencoba memperdalam permasalahan sampah yang terjadi dengan melihat dari bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatur atau mengelola permasalahan sampah dan hambatan apa saja yang dihadapi.

Sebenarnya sudah banyak pihak swasta yang ikut berpartisipasi dengan menyediakan bank sampah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan sampah yang terjadi. Akan tetapi, apabila tingkat kesadaran masyarakatnya sendiri masih rendah dan masih banyak membuang sampah sembarangan, maka permasalahan sampah yang selama ini mengganggu lingkungan tidak akan pernah terselesaikan. Dibutuhkan kebijakan yang lebih kuat dan strategi yang lebih efektif dari Pemprov DKI Jakarta. Selama ini pengelolaan atau pembuangan sampah kebanyakan dilakukan dengan cara menguburnya ke dalam tanah atau masyarakat umum biasanya mengatasi sampah yang menumpuk dengan cara dibakar.⁴ Hal ini dilakukan karena cara pengolahan sampah yang lain belum efektif menyelesaikan permasalahan yang ada. Tentunya cara yang dilakukan tersebut mempunyai banyak resiko karena adanya dampak pencemaran air tanah maupun pencemaran udara yang disebabkan oleh asap pembakaran.

⁴ Damanhuri, Enri. Tri Padmi. 2010. Diktat Kuliah TL-3104 (Versi 2010). Program Studi Teknik Lingkungan FTSL ITB. Bandung. Hal 9

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

Untuk dapat memahami pemaknaan kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa tokoh atau pendapat ahli yang bermacam-macam. Hal tersebut dapat terjadi karena kebijakan publik mencakup beberapa bidang yaitu sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi, dan lainnya.

Menurut Thomas R. Dye dalam buku Abdoellah & Rusfiana (2016:18) yang berjudul “Teori dan Analisis Kebijakan Publik” mendefinisikan kebijakan publik adalah bukan hanya semua hal yang sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi juga termasuk juga semua hal yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Lebih jelasnya adalah kebijakan publik ialah urutan kegiatan yang telah dan dilaksanakan atau belum dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berfokus pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Pengertian ini mengandung implikasi:

1. Semua kebijakan dalam perdananya merupakan penetapan tindakan yang dilakukan pemerintah
2. Semua kebijakan itu bukan hanya dinyatakan, tetapi juga untuk dilaksanakan
3. Semua jenis kebijakan itu mempunyai maksud dan tujuan tertentu
4. Semua kebijakan itu harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat.

Berbeda dengan pemaknaan dari teori Dye, Chief J.O Udoji dalam buku Abdoellah & Rusfiana (2016:17) yang berjudul “Teori dan Analisis Kebijakan Publik” menafsirkan kebijakan publik sebagai suatu kegiatan bersanksi yang berorientasi pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berhubungan yang memengaruhi beberapa masyarakat.

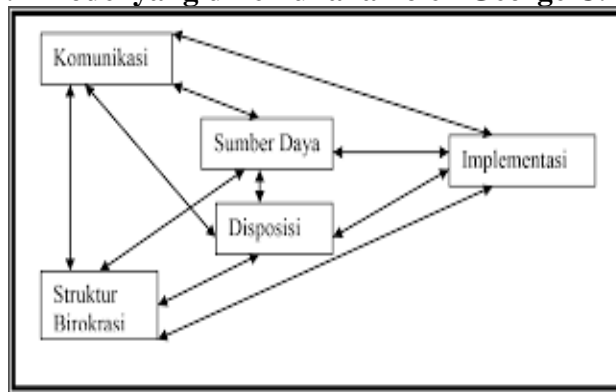
Agenda perumusan kebijakan publik biasanya selalu didasarkan pada permasalahan lingkungan yang terjadi, baik itu permasalahan dalam sektor ekonomi, sosial, politik, ataupun budaya. Kebijakan publik dilihat sebagai suatu hal yang positif karena selalu menampilkan hambatan maupun kemungkinan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Konsep ini sejalan dengan penafsiran dari Carl J. Frederick yaitu kebijakan publik bertindak sebagai arah kegiatan yang telah terusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam pengaturan tertentu. Selain itu, kebijakan publik menyuguhkan hambatan maupun peluang bagi kebijakan yang diusulkan dalam mencapai tujuan tertentu.

Apabila ketiga penafsiran tersebut ditarik secara garis besar, maka kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang berbentuk program dan menetaskan kegiatan, sebelum nantinya kebijakan tersebut diimplementasikan di kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

1.6.2 Implementasi Kebijakan Publik

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan konsep implementasi kebijakan publik dari Edward III dalam buku Dwiyanto Indiahono (2017:31) yang berjudul “Kebijakan Publik Berbasis *Dynamic Policy Analysis*” menyatakan bahwa terdapat empat variabel atau faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Berikut adalah gambar model yang disampaikan oleh George C. Edward III.

Gambar 1.2 Model yang dikemukakan oleh George C. Edward III



(Sumber: Edward III, *Implementing Public Policy*, 1980)

1. Komunikasi, sebuah kebijakan bisa berjalan dengan lancar apabila adanya komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dengan para penerima kebijakan tersebut. Apabila kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan, itu menandakan tujuan dan sasaran dari komunikasi tersampaikan dengan baik.
2. Sumber daya, sebuah kebijakan yang berjalan dengan lancar harus ditopang oleh sumber daya yang optimal. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia, seperti finansial atau fasilitas. Sumber daya manusia

adalah kecukupan kualitas maupun kuantitas pembuat kebijakan yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan anggaran atau dana atas sebuah kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial maupun fasilitas yang optimal program tidak akan dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai sebuah tujuan dan sasaran yang ingin dituju.

3. Disposisi, merujuk pada sebuah sikap atau karakteristik yang menjadi ciri khas atau menempel erat kepada pembuat kebijakan. Sikap atau karakter yang harus dimiliki oleh pembuat kebijakan adalah demokratis, komitmen dan kejujuran. Hambatan yang terjadi dalam sebuah kebijakan akan dapat dilewati apabila pembuat kebijakan atau implementor memiliki komitmen tinggi dan jujur.
4. Struktur birokrasi, di dalamnya terdapat dua faktor yang penting yaitu adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri atau penanggung jawab dari kebijakan tersebut. Mekanisme implementasi program pada umumnya telah ditetapkan melalui *Standard Operating Procedure (SOP)*.

Berdasarkan penafsiran tersebut, dijelaskan secara jelas bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan suatu individu atau kelompok untuk mencapai sebuah tujuan dalam perumusan kebijakan. Akan tetapi, semestinya beban tanggung jawab implementasi tidak hanya kepada individu atau kelompok terkait, melainkan menyangkut pula dengan berbagai jejaring kekuatan politik, ekonomi, serta sosial.

Implementasi atau pelaksana kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas atau tindakan setelah suatu kebijakan direncanakan. Apabila tidak adanya tindakan atau implementasi setelah kebijakan itu dibuat, maka suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut akan tidak ada maknanya. Hal tersebut menjadikan implementasi kebijakan mempunyai posisi atau tempat yang penting di dalam sebuah kebijakan publik.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Dari beberapa pemaparan teori diatas, peneliti akan memakai konsep dari George C. Edwards III yang mengemukakan bahwa empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat berpengaruh mengenai keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Berdasarkan teori tersebut, aspek dan indikator implementasi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta dapat dilihat dari tabel di bawah.

Tabel 1.1 Operasionalisasi Konsep Model George C. Edward III

Aspek	Indikator
Komunikasi	1. Sosialisasi program 2. Koordinasi lintas elemen
Sumber Daya	1. Sumber daya manusia 2. Sumber daya non manusia (finansial dan fasilitas)
Disposisi	1. Sikap pelaksana kebijakan 2. Sikap penerima kebijakan
Struktur Birokrasi	1. Penanggung jawab kebijakan 2. Institusi atau lembaga yang terlibat

(Sumber: Edward III, *Implementing Public Policy*, 1980)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif yang dimaksudkan disini adalah untuk mengamati perilaku, pandangan ataupun aktivitas dengan cara digambarkan dengan menggunakan sebuah bentuk kata (Moleong, 2010:6). Struktur deskriptif ini mempunyai sebuah tujuan untuk menerangkan atau menyimpulkan berbagai keadaan, kondisi di lapangan yang menjadi tujuan atau arah penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Pada situasi ini yang diamati adalah upaya atau strategi yang dilakukan dalam mengatasi sampah tersebut maupun perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat dalam penelitian yang dilakukan ini berada di wilayah Kota Jakarta. Lokasi tersebut dipilih karena Jakarta merupakan salah satu kota yang menghasilkan cukup banyak sampah dan belum terselesaikan hingga saat ini. Jumlah sampah yang dihasilkan salah satu yang terbanyak di Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi permasalahan. Oleh karena itu, Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian ini.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek ini ialah bagian yang dianalisis yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti. Orang yang dimintai atau memberikan keterangan

tentang suatu fakta atau pendapat adalah yang disebut dengan subjek penelitian (Arikunto, 2006:145). Subjek yang terkait di dalam penelitian ini terfokus dari beberapa subjek, yaitu dari kalangan pemerintah dan masyarakat. Dari pihak pemerintah yang terkait dalam hal ini adalah seperti Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang mengatur mengenai permasalahan sampah. Sedangkan subjek dari masyarakat adalah karena masyarakat yang menghasilkan sampah itu sendiri dari kehidupan sehari-harinya.

1.8.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang ada dalam tulisan ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

1.8.4.1 Data Primer

Data yang berasal dari sumber asli atau pertama adalah yang disebut dengan data primer. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file. Data primer yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data, biasanya disebut narasumber atau dalam istilah teknisnya yaitu responden (Narimawati, 2008:98). Dalam penelitian ini, data primer berasal dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, ataupun wawancara dengan masyarakat.

1.8.4.2 Data Sekunder

Menurut Kuncoro (2009:145) ia berpendapat bahwa data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau pihak ketiga disebut data sekunder. Apabila ingin mendapatkan data sekunder ini peneliti dapat mencari melalui sumber data lain yang masih berkaitan dengan data yang ingin dicari. Di dalam penelitian ini sumber data sekunder didapat dari berbagai literatur, buku, jurnal maupun situs web yang tersedia yang membahas mengenai permasalahan sampah.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk membantu dalam proses mengumpulkan data, teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah lewat observasi, wawancara dan dokumentasi.

1.8.5.1 Observasi

Pengamatan atau pencatatan yang dilakukan secara teratur terhadap suatu aktivitas yang terlihat dalam suatu perihal di dalam objek penelitian disebut juga dengan observasi (Widoyoko, 2014:46). Hasil observasi atau pengamatan tersebut disusun dalam bentuk catatan sehingga data yang dimiliki mempunyai tingkat validitas yang tinggi. Seluruh kegiatan atau kebijakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola sampah termasuk dalam observasi penelitian ini.

1.8.5.2 Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan melaksanakan tanya jawab secara langsung antara pengumpul data dengan sumber data ataupun peneliti dengan narasumber disebut juga dengan wawancara. Wawancara termasuk bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilaksanakan melalui percakapan dan tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung dengan narasumber (Arifin, 2014:157). Dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk mencari informasi secara langsung dengan narasumber yang terkait seperti Kepala Seksi bidang Peran Serta Masyarakat (PSM), Sub Koordinator urusan perencanaan Teknis Lingkungan dan Kebersihan (TLK), pendamping riset bagian kepegawaian TPST Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta maupun tokoh masyarakat seperti Ketua Rukun Warga.

1.8.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara menemukan data tentang hal-hal atau variabel yang berbentuk notulen rapat, surat kabar, catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya. (Arikunto, 2013:274). Dalam penelitian ini, dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data yang bersifat catatan yang sudah ada seperti dari buku, jurnal

maupun media massa yang berkaitan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola sampah.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif seperti yang dimaksud oleh Miles dan Hubberman (1992) yaitu, pengumpulan, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Di dalam bagian ini juga bisa dibarengi dengan melakukan analisis data sekaligus. Bentuk datanya adalah segala sesuatu yang dapat dilihat, didengar dan diamati.

b. Reduksi data

Pada bagian ini adalah proses perangkuman yang dilakukan melalui seleksi dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang penting dan dapat digunakan.

c. Penyajian data

Biasanya penyajian yang sering digunakan pada data kualitatif adalah berbentuk naratif. Penyajian data berupa beberapa informasi yang tersusun secara teratur dan mudah dimengerti.

d. Penarikan kesimpulan

Dalam tahap akhir ini analisis data yang telah disusun kemudian dibandingkan satu sama lain untuk nantinya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.